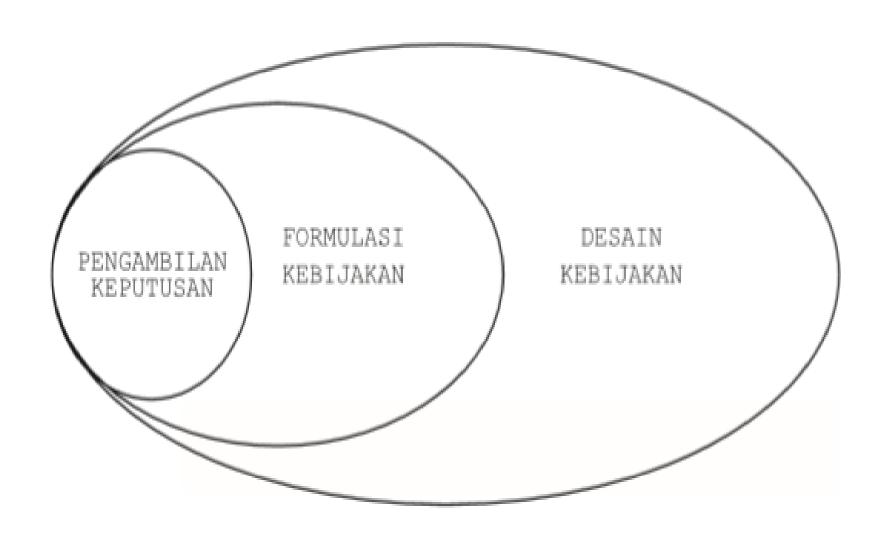
PRAKTEK MENGENAL PENDEKATAN DAN RASIONALITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN Dr. NOVERMAN DUADJI

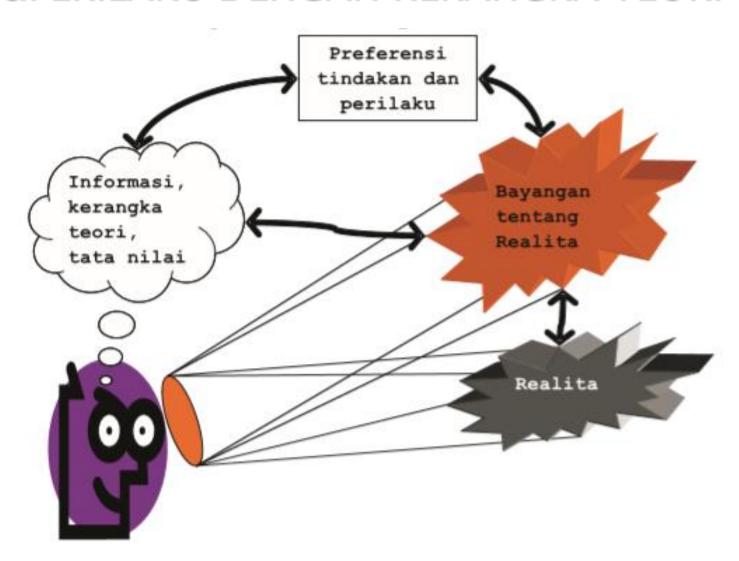
CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Memahami Pendekatan kekuasaan, institusi, pilihan publik (deliberatif) dan Rasionalitas
- 2. Memahami RASIONALITAS dalam pengambilan keputusan

HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN DESAIN KEBIJAKAN



HUBUNGAN PREFERENSI TINDAKAN & PERILAKU DENGAN KERANGKA TEORI



PERLUNYA PENDEKATAN.....

PERTAMA,

BAGAIMANA upaya pengambil keputusan menghasilkan sebuah keputusan kebijakan melalui model dan tehnik analisis keputusan yang rasional sehingga dapat memecahkan persoalan kepublikan secara cerdas, bijaksana dan memberikan harapan bagi meningkatkan harkat dan martabat kehidupan kepublikan.

KEDUA

BAGAIMAN Solusi yang ditawarkan sebagai metode pemecahan masalah tersebut adalah dengan perspektif rasionalitas, melalui penggunaan model dan tehnik-tehnik analisis keputusan yang tepat, dimensi-dimensi yang potensial, berdasarkan data empirik kajian teoritik yang relevan.

KETIGA

Ada output hasil analisis berupa <u>KERTAS KERJA</u> (Formula kebijakan dan desain)

MAKNA MEMAHAMI PENDEKATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

- MENGEVALUASI berbagai pendekatan/perspektif yang memberikan kerangka penjelasan yang "paling masuk akal" untuk menerangkan suatu keputusan tertentu.
- Pengambil Keputusan konteks MODERN ADALAH: sejauhmana ia melibatkan penggunaan pengetahuan, informasi dan kekuasaan sebagai basis yang lebih rasional dari keputusan.

DIMENSI PENTING PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ADALAH RASIONALITAS yang bagaimana, yang memiliki tingkat kompatibel dengan dunia riil pembuatan keputusan, dimana tentu dalam pembuatan keputusan kebijakan akan ada banyak konflik fakta dan nilai, cara dan tujuan, dan dimana ada ketidakpastian yang tinggi.

4 PENDEKATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. PENDEKATAN/KERANGKA KEKUASAAN

- PK sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukkan oleh <u>struktur kekuasaan: kelas, orang kaya, tatanan</u> <u>birokratis, dan tatanan politik, kelompok penekan,</u> <u>dan kalangan professional atau ahli pengetahuan</u> <u>teknis</u>.
- Ada enam pendekatan dan variannya dari kerangka kekuasaan yang dapat dipakai sebagai lensa dalam pembuatan keputusan kebijakan (Parson, 2006: 250-251)., yaitu:
- 1. <u>Elitism</u>: berfokus pada cara kekuasaan dikonsentrasikan;
- 2. <u>Pluralisme</u>: berfokus pada cara kekuasaan diditribusikan;
- 3. K<u>orporatisme</u>: berfokus pada kekuasaan kepentingan yang terorganisir;
- 4. <u>Profesionalisme</u>: berfokus pada kekuasaan kalangan profesional;
 - Teknokrasi: berfokus pada kekuasaan pakar teknis

KERANGKA ELITIS

- PEMBUATAN KEPUTUSAN adalah, proses yang dilaksanakan demi keuntungan elite-elite tersebut. Sebagai sebuah model pembuatan keputusan, tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap cara dunia riil berjalan. Dikatakan bahwa dalam dunia riil ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada massa yang tak memegang kekuasaan.
- Laswelll (dalam Parson, 2006: 252) mengatakan bahwa ada sirkulasi elite dan ada pergeseran yang terjadi dari perjuangan kelas ke perjuangan antar "kelompok-kelompok keahlian" yang berbeda, antara lain:
- (1). orang-orang yang terlatih menggunakan kekerasan (seperti, elite militer dan polisi);
- (2). orang-orang mempunyai keahlian komunikasi dan propaganda;
- (3). orang yang punya keahlian bisnis dan perdagangan;
- (4). "teknokrat" yang mempunyai pengetahuan teknis khusus;
- (5). birokrat yang mempunyai keahlian administrative dan organisasional.

KERANGKA PLURARISME

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADALAH evolusi proses berupa jaringan dan komunitas kebijakan.
- Smith (1993:74) bahwa ide jaringan/komunitas kebijakan, bagaimanapun, adalah bersifat *multi*theoritic dan bisa diaplikasikan oleh pendekatan selain pluralism. Jika diaplikasikan dengan cara ini, model pluralis memberikan kerangka umum, dimana negara berusaha untuk membuat keputusan dengan mengelola kelompok-kelompok dan eliteelite kunci di dalam masyarakat.

KERANGKA KORPORATIS

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADALAH sistem representasi kepentingan di mana unit-unit konstituennya diorganisasikan dalam sejumlah kategori yang terbatas, tunggal, wajib, nonkompetitif, hierarkis, dan diakui atau diizinkan (jika bukannya diciptakan) oleh negara dan diberi monopoli representasional di dalam kategori masing-masing.
- Pemberian ini ditukar dengan kepatuhan pada kontrol pada pemilihan pemimpin mereka, dan artikulasi tuntutan dan dukungan

KERANGKA TEKNOKRASI

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADALAH aplikasi prinsip ilmiah dan teknologi kedalam organisasi sosial, politik, dan ekonomi.
- Jika ingin menghindari chaos, para teknokrat mengatakan bahwa masyarakat harus direorganisasikan secara fundamental sehingga problem dapat ditangani secara ilmiah.

KERANGKA PROFESIONALISME

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN memusatkan perhatian sejauh mana elite profesional mendapatkan kekuasaan dalam pembuatan keputusan.
- profesionalisme ADALAH NEGOISASI ANTARA pengetahuan, keahlian, dan pandangan profesional

PENDEKATAN INSTITUSI/KELEMBAGAAN

2 kerangka analisis institusional, yakni: Pertama, Institusionalisme sosiologis, yang terkait erat dengan karya awal David Selznick dan eksponen yang belakangan seperti March dan Olsen, Perrow, serta Di Maggio dan Powell. Kedua, Institusionalisme ekonomi, yang diajukan dalam dua bentuk teori utama, ekonomi biaya transaksi, dan teori agen (agency).

Kerangka institusionalisme sosiologis

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN oleh individu dan kelompok, karenanya, harus dipahami sebagai pemilihan yang difokuskan pada kebutuhan orang-orang di dalam institusi, dan orang-orang yang berusaha mengejar tujuan formal institusi. Orang-orang itu tergantung kepada organisasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan organisasi tergantung pada lingkungan tempat ia berada.
- KEPUTUSAN sering kali dibuat lebih demi kepentingan organisasi dan anggotanya ketimbang demi mengejar tujuan kebijakan formal.
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN dalam organisasi mungkin digerakkan oleh logika dalam: kepentingan dan nilai-nilai dari anggotanya, oleh kebutuhan untuk menyesuaikan atau mengganti tujuan, bukan oleh kalkulasi rasional.

Kerangka Institusionalisme Ekonomi

- Didasari oleh pandangan batas sempit *Homo* economicus, di mana manusia didorong oleh kepentingan diri dan penghargaan pada diri. Efisiensi adalah soal pemenuhan kepentingan diri dan memonitor atas apa yang dikejar manusia dan pengambilan keputusan adalah dunia pasar.
- PENDEKATANNYA adalah memasukkan etos konsumeris ke dalam pelayanan publik sehingga pemilih/ warga dilihat sebagai konsumen yang relasinya dengan pelayanan publik dimediasi melalui quasi-kontrak seperti sasaran kinerja dan "pernyataan misi".

KERANGKA/PENDEKATAN PILIHAN PUBLIK

Pendekatan ini menekankan pada 2 pokok (sentral) sebagaimana dikemukakan oleh Frederickson dan Smith (2012: 185), yaitu:

Pertama, individu mengerti akan kebutuhannya, mengerti akan pilihannya, dan mengerti pilihan yang terbaik bagi mereka dengan memilih opsi pilihan yang menggunakan biaya yang sedikit (pengaruh dari neo-klasi ekonomi).

Kedua, mengasumsikan bahwa semua keputusan yang dihasilkan adalah perwujudan dari tindakan dan keputusan individu yang kolectif Kerangka Pilihan publik merupakan perspektif ekonomi yang diaplikasikan pada sektor publik

LANJUTAN

- Kajian kerangka ini berpandangan, bahwa peran pemerintah menjadi actor utama dalam penyediaan barang-barang publik. Reformasi yang berkembang yang diberikan pendekatan pilihan publik adalah pemerintah tidak lagi menjadi actor utama dalam penyediaan pelayanan publik, dimana adanya ketérlibatan pihák swasta dan masyarakat sebagai bagaian terciptanya demokrasi. Ketika pemerintah tidak lagi dapat memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dalam pendekatan dan kerangka ini, maka swasta dapat mengambil alih untuk memberikannya guna mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.
- Kerangka ini juga pada dasarnya menekankan pada demokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang

KERANGKA/PENDEKATAN RASIONALITAS

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADALAH Bangunan Rasionalitas ekonomi memandang pada dasarnya setiap orang, dalam membuat keputusan berdasarkan pada suatu pilihan berdasarkan informasi yang tersedia, membandingkan informasi tentang opsi yang berbeda-beda, kemudian dia akan memilih opsi yang bisa membuatnya mendapatkan tujuannya atau kepentingannya.
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIPENGARUHI OLEH PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN <u>DALAM</u> <u>BIROKRASI</u>

RASIONALITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MARCH, 1988

"prosedur untuk membuat pilihan", termasuk didalamnya rasionalitas proses yang disebut sebagai rasionalitas prosedur, dan rasionalitas substantive yang menghubungkan pilihan untuk mencapai sasaran

DUNN,2000

PEMILIHAN secara nalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan.

"SUBSTANSI" RASIONALITAS

- BERDASARKAN <u>cara, logika akhir, dan asumsi</u> bahwa pertanyaan yang muncul adalah *bagaimana* memilih cara yang paling baik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
- ADA fakta dan nilai terkait cara dan tujuan dalam proses pembuatan keputusan dimana alternatif sudah dipilih dengan mempertimbangkan cara yang tepat untuk menjangkau keinginan akhir yang sering kali hanya sebagai instrumen untuk tujuan akhir yang utama.
- Rasionalitas dilakukan dengan mengkonstruksikan rantai cara-tujuan pada masalah".

Dunn (2000) LANGKAH-LANGKAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN RASIONAL KOMPREHENSIF

- MENGIDENTIFIKASI masalah kebijakan yang diterima sebagai konsensus oleh semua pelaku kebijakan yang relevan.
- MENDIFINISIKAN DAN MENGURUTKAN secara konsisten tujuan dan sasaran yang pencapaiannya mencerminkan pemecahan masalah.
- MENGIDENTIFIKASI semua pilihan kebijakan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran.
- MERAMALKAN semua konsekuensi yang akan dihasilkan oleh seleksi setiap alternatif.
- MEMBANDINGKAN setiap pilihan dalam hal akibatnya terhadap pencapaian setiap tujuan dan sasaran.
- MEMILIH alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan.

JENIS-JENIS RASIONALITAS

- <u>Rasionalitas Teknis</u>. Merupakan karakteristik pilihan yang bernalar, yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah publik secara efektif.
- Rasionalitas Ekonomis. Merupakan karakteristik pilihan yag bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuannya untuk menemukan pemecahan masalah publik yang efisien.
- Rasionalitas Legal. Merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yag meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya.
- Rasionalitas Sosial. Merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai, yaitu untuk menyelenggarakan pelembagaan.
- Pasionalitas Substantif. Merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas tehnis ekonomis, legal, sosial dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling banyak di bawah kondisi yang ada.

Frederickson dan Smith (2012)

Ada 2 logika rasional dalam teori keputusan, yakni :

Pertama, logika keputusan rasional dari konsekuensi.

Kedua, logika keputusan rasional dari kelayakan/berkesesuaian (kepatutan).

KEPUTUSAN RASIONAL DAN LOGIKA KONSEKUENSI

Keputusan rasional dan logika konsekuensi dilakukan berdasar konsekuensi pilihan yang lebih mengantisipasi masa datang, hasil atau tujuan. Bendor, Taylor, dan Von Gaalen (dalam Frederickson dan Smith,2012: 167-172), mengemukakan beberapa batasan keputusan rasionalitas dalam kaitan dengan logika konsekuensi, yakni :

(a). Informasi.

Pertama, kapasitas individu dan organisasi untuk memproses informasi, khususnya dilingkungan kaya informasi, diilustrasikan oleh fungsi mesin pencari internet. **Kedua,** terjadinya kelebihan beban masalah membutuhkan perhatian, dan tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Ketiga, adanya keterbatasan perhatian, baik dalam hal waktu dan kemampuan.

Keempat, masalah komunikasi muncul dari kompartementalisasi, subkultur professional, bahasa dan informasi yang berlebihan

(b). Atensi.

Perhatian, baik secara individu maupun kolektif, adalah sumber daya yang langka, tercermin dalam keterbatasan waktu, terlalu banyak informasi, perubahan masalah, dan perubahan prioritas

(c). Risk Taking.

Perkiraan risiko organisasi dipengaruhi oleh dua fitur sederhana yaitu

PERTAMA, keberhasilan masa lalu pembuat keputusan kunci, KEDUA, kedua, kecenderungan melebih-lebihkan perkiraan. Risiko dalam teori keputusan adalah fungsi dari pengaruh ketidakpastian pada rasionalitas. Rasionalitas keputusan dibatasi oleh ketidakpastian tentang konsekuensi tindakan terkini, bahkan ketidakpastian yang lebih besar tentang kemungkinan konsekuensi masa depan dari kemungkinan keputusan masa depan.

(d). Formal Testing of Bounded Rationality.

Generalisasi rasionalitas terbatas ini dilihat dari logika konsekuensi keputusan, dasar dari peryataan subjek yang dapat diuji pada pemodelan dan pengujian eksperimental lapangan. Sebagian besar ilmuwan mendasarkan diri pada asumsi, bahwa dengan mendasarkan pada model institusi dan pilihan pembuatan eksperimen, membuat eksperimen dalam pengaturan yang terkontrol.

Logika kepatutan memiliki beberapa karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Frederickson dan Smith, 2012), yakni

Pertama, Perlakuan ketidakpastian dan ambiguitas

Kedua, munculnya loose coupling, garbage cans dan minimnya atensi

KETIGA, Keputusan rasional dan logika kepatutan/berkesesuaian berorientasi pada suatu tujuan pemahaman yang kurang terkait dengan asumsi efisiensi, persaingan pasar seperti, dan asumsi kepentingan diri sendiri dan lebih terkait dengan aturan assumptionof, identitas, situasi, dan tindakan.

KEEMPAT, Pembuatan keputusan kebijakan mengikuti logika kepatutan adalah sangat kontekstual. Pembuatan keputusan sangat diinformasikan dengan aturan kontekstual dan identitas penuh dengan ambiguitas, ketidakpastian, risiko, informasi tidak sempurna, dan perhatian terbatas. sebagainya. Proses ini melibatkan analisis, tawar-menawar, pola imitasi, dan pengalaman trial-and-error pada institusi.

KELIMA. Pola pengambilan keputusan dalam sebuah institusi bisa berubah sesuai adaptasinya terhadap masa depan yang lebih disukai, membayangkan mengambil bentuk perencanaan strategis, visi latihan, aspirasi para pemimpin, penganggaran jangka panjang, dan